Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 10(1): 1-6
Publisher by Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2580-6882 (Online) | ISSN 2087-5304 (Print)

Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017

Jasasila
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Bulian
Correspondence email: jasasila@yahoo.co.id

Abstract. *The formulation of the problem in this study is How the Development of Regional Retribution in Batanghari Regency in 2017 and How the Analysis of Contribution of Retribution for Health Services to the Receipt of Regional Retribution in Kabupaten Batanghari in 2017, with the scope of Special Retribution for Parking, Retribution for Health Services and Retribution for Motorized Vehicle Testing. While the purpose of this study was to determine the development of Regional Retribution and Retribution Contributions to Health Services for 2017 Regional Retribution Receipts. The type of data used in this study is a set of information or facts recorded through direct observation while the data used is sourced from the Batanghari Regency Central Bureau of Statistics . From the results of the study, it was found that the Development of Regional Retribution in Batanghari Regency during 2017 experienced fluctuations, the largest development occurred in November 2017, namely 110.18% increase in Regional Retribution from the previous month (October 2017), while the biggest decline occurred in December 2017 where there was a decrease in revenue from Regional Retribution of 57.64% from the previous month (November 2017). During 2017 the average contribution of Retribution for Health Services to Regional Retribution was 76.67%, this shows that Health Service Retribution is the largest source of Retribution in the Regency of Batanghari in 2017*

Keywords *; Contributions, Regional Retribution, Health Services*

PENDAHULUAN

Untuk menjalankan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini juga sebagai penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan secara maksimal. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, dengan kata lain dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintah. Seperti yang diamanatkan dalam Undang–undang No. 09 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2001 yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melakukan otonomi seluas-luasnya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), maka diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengurus rumah tangga daerahnya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah atau lebih dikenal dengan sebutan APBD merupakan suatu kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja, serta alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja. Penilaian kinerja dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan

Upaya untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan mengintensifkan pengkajian dan penggalian potensi keuangan daerah, yang dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan baru. Penyediaan dana bagi pembangunan daerah harus diusahakan sedapat mungkin dapat terealisasi dalam jumlah besar. Karena pembangunan daerah memerlukan biaya yang terus meningkat. Pendapatan daerah di Kabupaten Batang Hari dapat digolongkan atas pendapatan yang bersumber dari pajak dan Retribusi. Realisasi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan dapat terus meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan

daerah. Sejalan dengan hal tersebut Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam menunjang otonomi daerah. Peningkatan Penerimaan Retribusi daerah akan bisa memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber Retribusi daerah akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis Retribusi Daerah adalah :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau pelayanan yang lebih baik.

Jenis- jenis Retribusi Jasa Umum adalah

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteriakriteria sebagai berikut

a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
g. Retribusi Penyedotan Kaskus
h. Retribusi Rumah Potong Hewan
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c. Retribusi Izin Gangguan
d. Retribusi Izin Trayek.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfatan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa ; (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Sedangkan pada Pasal 13 berbunyi ; (1) Subjek retribusi orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum. (2) Wajib retribusi adalah orang dan/atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Masalah Penelitian

Dari Uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2017
2. Bagaimana Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017

Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2017
2. Untuk Mengetahui Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dicatat melalui pengamatan langsung dan survei (Indrianto dan Supomo ; 2009:249), sehingga jenis data tersebut menjadi dua Jenis yaitu :

1. Data kualitatif adalah data-data yang tidak berwujud angka, berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.
2. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka, berupa data-data keuangan perusahaan atau organisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut yaitu data laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017 yang terdiri dari Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kendaraan Bermotor selama 12 (dua belas) bulan ditahun 2017. Sedangkan Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan sumber data primer yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari dengan URL http://bit.ly/31beHUK

Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017

Bulan	Retribusi		
	Tempat Khusus Parkir	Pelayanan Kesehatan	Pengujian Kendaraan Bermotor
Januari	0	79.105.500,00	12.668.000,00
Februari	8.275.000,00	73.769.500,00	12.521.000,00
Maret	6.535.000,00	69.412.500,00	15.163.000,00
April	9.295.000,00	71.821.500,00	168.000,00
Mei	10.675.000,00	66.450.500,00	27.714.000,00
Juni	13.550.000,00	49.669.000,00	13.472.000,00
Juli	11.465.000,00	79.650.500,00	13.840.000,00
Agustus	7.050.000,00	74.681.000,00	16.407.000,00
September	14.930.000,00	70.125.500,00	14.150.000,00
Oktober	6.560.000,00	79.317.500,00	11.620.000,00
November	10.200.000,00	187.286.000,00	7.438.000,00
Desember	12.640.000,00	58.784.500,00	15.376.000,00
Jumlah	111.175.000,00	960.573.500,00	160.537.000,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Batanghari

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada, sedangkan ruang lingkup yang dibahas ada Realisasi Penerimaan Retribusi bulan Januari sampai dengan Desember 2017 yang meliputi :

1. Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir
2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
3. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Terdapat perhitungan dalam metode analisis yaitu menghitung Perkembangan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 dengan rumus :

$$Y_{rpk} = \frac{rpk - rpk_{-1}}{Rpk_{-1}} \times 100\%$$

Dimana :

Y_{rpk} = Perkembangan Retribusi Pelayanan Kesahatan

rpk = Retribusi Pelayanan Kesahatan tahun analisis

rpk_{-1} = Retribusi Pelayanan Kesahatan sebelum tahun analisis

Kemudian untuk menghitung Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017 dengan rumus :

$$K_{rpk} = \frac{R_{rpk}}{R_{rd}} X\ 100\%$$

Dimana :

K_{RPK} = Kontribusi Retribusi Pelayan Kesehatan

R_{rpk} = Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan

R_{rd} = Realisasi Retribusi Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017

Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017

Bulan	Total Penerimaan	Perkembangan %
Januari	91.773.500,00	0
Februari	94.565.500,00	3,04%
Maret	91.110.500,00	-3,65%
April	81.284.500,00	-10,78%
Mei	104.839.500,00	28,98%
Juni	76.691.000,00	-26,85%
Juli	104.955.500,00	36,86%
Agustus	98.138.000,00	-6,50%
September	99.205.500,00	1,09%
Oktober	97.497.500,00	-1,72%
November	204.924.000,00	110,18%
Desember	86.800.500,00	-57,64%
Rata-rata		6,08%

Sumber : Data Diolah

Dari data diatas dapat dijelaskan Perkembangan realisasi penerimaan retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017 mengalami Fluktuatif dimana pada bulan Februari 2017 terjadi peningkatan penerimaan sebesar 3,04% dari bulan sebelumnya (januari 2017) kemudian pada bulan Maret 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari mengalami penurunan sebesar 3, 65% dari bulan sebelumnya, pada bulan April 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari kembali mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 10,78% tetapi pada bulan Mei 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari mengalami perkembangan peningkatan yang siginifikan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 28,98%. Sedangkan pada bulan Juni 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari kembali mengalami penurunan sebesar 16,85% dari bulan sebelumnya. Untuk bulan Juli 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari kembali mengalami peningkatan sebesar 36,86% dari tahun sebelumnya dan kembali turun pada bulan Agustus 2017 sebear 6,50% dari bulan sebelumnya, pada bulan September 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari hanya mengalami peningkatan sebesar 1,09% dari bulan sebelumya dan kembali turun pada bulan Oktober 2017 sebesar 1,72% dari bulan sebelumnya dan mengalami peningkatan yang sangat siginifikan pada bulan November 2017 sebesar 110,81% dari Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari bulan sebelumnya. Terakhir pada bulan Desember 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari kembali turun sebesar 57,64% dari bulan sebelumnya. Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari selama tahun 2017 tersebut secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata perkembangan 6,08%.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017

Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017

Bulan	Pelayanan Kesehatan	Retribusi Daerah	Kontribusi %
Januari	79.105.500,00	91.773.500,00	86,20%
Februari	73.769.500,00	94.565.500,00	78,01%
Maret	69.412.500,00	91.110.500,00	76,18%
April	71.821.500,00	81.284.500,00	88,36%
Mei	66.450.500,00	104.839.500,00	63,38%
Juni	49.669.000,00	76.691.000,00	64,77%
Juli	79.650.500,00	104.955.500,00	75,89%
Agustus	74.681.000,00	98.138.000,00	76,10%
September	70.125.500,00	99.205.500,00	70,69%
Oktober	79.317.500,00	97.497.500,00	81,35%
November	187.286.000,00	204.924.000,00	91,39%
Desember	58.784.500,00	86.800.500,00	67,72%
	Rata-Rata		76,67%

Sumber : Data Diolah

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017 Dapat dijelaskan sebagai berikut, Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terbesar terjadi pada bulan November 2017 Sebesar Rp. 187.286.00,- sedangkan Total Penerimaan Retribusi Daerah terbesar juga terjadi pada bulan November 2017 dengan Jumlah Penerimaan Sebesar Rp. 204.924.000,- sehingga Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah pada bulan November 2017 tersebut sebesar 91,39% yang merupakan Kontribusi terbesar sepanjang tahun 2017. Sedangkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terkecil selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juni 2017 sebesar Rp. 49.669.000,- sedangkan Penerimaan Retribusi Daerah pada bulan tersebut (Juni 2017) juga merupakan penerimaan terkecil dibandingkan dengan bulan lainnya selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 79.691.000,- dengan Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah sebesar 64,77%. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah terkecil selama tahun 2017 terjadi pada bulan Mei 2017 dengan kontribusi sebesar 63,38%, hal ini menunjukkan bahwa walaupun Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Penerimaan Retribusi Daerah pada bulan tersebut lebih besar dari bulan Juni 2017 tetapi Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah pada Mei 2017 lebih kecil dari Bulan Juni 2017 tersebut.Rata-rata Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah Tahun 2017 sebesar 76,76%, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan sumber terbesar dalam penerimaan Retribusi Daerah.

SIMPULAN

Dari Hasil Pembahasan yang sudah disajikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari selama Tahun 2017 mengalami Fluktuatif, perkembangan terbesar terjadi pada Bulan November 2017 yaitu 110,18% kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari bulan sebelumnya (oktober 2017), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Bulan Desember 2017, dimana terjadi penurunan penerimaan Retribusi Daerah sebesar 57,64% dari bulan sebelumnya (November 2017). 2) Selama tahun 2017 rata-rata Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah adalah 76,67%, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Sumber terbesar bagi Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, *http://bit.ly/31beHUK*

Halim, Abdul., (2001). "*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*". Jogjakarta: UPP AMP YKPN.

Magdalena, Rombang. 2013. *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Marchelino Daling. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 82-89

Kevin R.M. Mandey Dan Tri Oldy Rotinsulu. 2015. *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA 827 Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.827-838

Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi Dan Treesje Runtu.2016. *Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016